

## **Pelaksanaan Pemilukada Pada Masa Pandemic Covid 19**

**Oleh: Eny Kusdarini, Sunarso, Nasiwan, Suharno**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilukada pada masa pandemi Covid 19 yang dilakukan secara serentak pada bulan Desember 2020 di Indonesia utamanya di Kabupaten Bantul DIY. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya wabah pandemic Covid 19 yang melanda hampir seluruh negara-negara di dunia termasuk negara Indonesia yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai kegiatan masyarakat termasuk kegiatan di bidang politik yang mempunyai efek juga pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Untuk itu perlu dilihat permasalahan-permasalahan dan upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan pilkada secara serentak pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive dengan subjek penelitian adalah Ketua KPU dan Bawaslu di wilayah DIY utamanya di Kabupaten Bantul dan PPK di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Dokumen yang dicari adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pemilukada pada masa pandemic Covid 19 secara serentak pada bulan Desember tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan (1) pelaksanaan pemilukada serentak lanjutan di Kabupaten Bantul DIY pada saat pandemic Covid di tahun 2020 berjalan dengan baik, lancar dan tidak terjadi kendala yang sampai menyebabkan terjadinya pemilu ulang seperti di beberapa Kabupaten di Indonesia; (2) walaupun pelaksanaan pemilukada berjalan dengan baik dan lancar, namun tetap ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat pemilukada serentak lanjutan tahun 2020, pada tahap persiapan pemilukada bahkan terjadi juga pada saat penetapan dan pengesahan pengangkatan calon terpilih; (3) upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilukada serentak lanjutan tahun 2020 yakni terkait dengan kurangnya pendaftar PPS dan KPPS dan PPDP, KPU Bantul berkoordinasi secara intensif dengan pemangku wilayah setempat. Upaya lain terkait dengan kendala petunjuk teknis dari pusat yang sering berubah KPU Bantul meminta KPU pusat agar jangan mengeluarkan kebijakan yang sering berubah dan meminta KPU pusat dalam pembuatan regulasi untuk pemilukada berikutnya agar dapat dilakukan di awal tahapan sehingga tidak menyulitkan petugas di tingkat bawah termasuk dalam penggunaan aplikasi SIREKAP sebaiknya direncanakan dari awal, sehingga kendala-kendala bisa diatasi jauh sebelum pelaksanaan.

*Kata Kunci: Pelaksanaan, pemilukada, masa pandemi Covid 19, Kabupaten Bantul, Indonesia*